

Relasi Industri Ekstraktif dan Pemerintahan Desa: Studi Ekonomi Politik PT. SEMEN TONASA dan Desa Biringere, Kabupaten Pangkep

Putri Resky Aulia¹

¹ Universitas Hasanuddin; Watirah22e@student.unhas.ac.id

Abstract: Keberadaan industri ekstraktif di Tingkat lokal tidak hanya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi tata kelola pemerintah desa, distribusi pembangunan, dan relasi kekuasaan di Tingkat lokal. Desa Biringere sebagai wilayah yang berada di sekitar operasional PT. Semen Tonasa memperlihatkan adanya hubungan yang kompleks antara perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara PT. Semen Tonasa Pemerintah Desa Biringere dalam memengaruhi tata kelola pemerintah desa, distribusi pembangunan, serta proses pengambilan Keputusan dengan menyoroti bentuk relasi dan ketergantungan struktural yang muncul dalam interaksi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis penelitian menggunakan perspektif ekonomi politik industri ekstraktif dan konsep Village Governance Regime (VGR) untuk memahami hubungan antara kekuatan ekonomi perusahaan dan tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara perusahaan dan pemerintah desa membentuk relasi kekuasaan yang cenderung asimetris. PT. Semen Tonasa memiliki pengaruh besar melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan dukungan pembangunan desa, sementara pemerintah desa berperan sebagai mediator antara perusahaan dan masyarakat. Ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap perusahaan turut memengaruhi partisipasi masyarakat, distribusi pembangunan, dan otonomi desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa industri ekstraktif berpengaruh terhadap tata kelola pemerintah desa serta membentuk ketergantungan dan relasi kekuasaan di tingkat lokal.

Keywords: Indust Relasi kekuasaan, industri ekstraktif, pemerintahan desa, ekonomi politik

1. Introduction

Industrialisasi pada sektor ekstraktif memiliki peran penting dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui peningkatan investasi, penerimaan negara, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan infrastruktur strategis (Addison et al., 2024). Namun, di balik kontribusi tersebut, industri ekstraktif juga sering menimbulkan berbagai persoalan sosial dan lingkungan, seperti pencemaran, berkurangnya lahan produktif, kesenjangan sosial, serta konflik kepentingan antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan tidak selalu berjalan seiring dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu contoh fenomena tersebut dapat dilihat pada keberadaan PT. Semen Tonasa di Desa Biringere, Kabupaten Pangkep. Kehadiran perusahaan telah mendorong perubahan sosial ekonomi yang signifikan, ditandai dengan pergeseran mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian menuju sektor industri dan jasa, meningkatnya aktivitas ekonomi, serta pembangunan berbagai sarana pendukung. Di sisi lain, ekspansi industri juga memunculkan berbagai konsekuensi, seperti berkurangnya lahan pertanian, meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, serta perubahan pola hubungan sosial masyarakat yang sebelumnya lebih kolektif dan berbasis gotong royong (Jannah, 2021).

Dalam perspektif ekonomi politik, industri ekstraktif tidak hanya berperan sebagai aktor ekonomi, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki pengaruh terhadap proses sosial dan politik di tingkat lokal. Hubungan antara perusahaan dan pemerintah desa sering kali menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan karena perusahaan memiliki sumber daya ekonomi yang lebih besar. Ketergantungan pemerintah desa terhadap bantuan pembangunan, program Corporate Social Responsibility (CSR), maupun dukungan ekonomi perusahaan berpotensi memengaruhi kemandirian pemerintah desa dalam menentukan prioritas pembangunan dan pengambilan kebijakan. Kondisi ini sejalan dengan konsep hubungan patron-klien yang menjelaskan bahwa perusahaan sebagai pemilik sumber daya ekonomi dapat memiliki pengaruh yang kuat terhadap arah pembangunan lokal (Yudana, 2024).

Sebagai salah satu perusahaan semen terbesar di Indonesia Timur, PT. Semen Tonasa tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional melalui penyediaan lapangan kerja dan pengembangan infrastruktur, tetapi juga menjalankan berbagai program CSR melalui

program Tonasa Bersaudara yang mencakup bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan lingkungan. Meskipun demikian, distribusi manfaat pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa industrialisasi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan kesenjangan sosial, konflik kepentingan, dan tekanan terhadap lingkungan apabila tidak dikelola secara adil dan partisipatif (Kamaruddin, 2024; Pane et al., 2021).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas dampak sosial ekonomi industri semen, pelaksanaan CSR, serta konflik antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah. Namun, kajian yang secara khusus menyoroti relasi antara perusahaan dan pemerintah desa dalam memengaruhi tata kelola pemerintahan, distribusi pembangunan, dan proses pengambilan keputusan di tingkat lokal masih relatif terbatas. Padahal, relasi tersebut berperan penting dalam menentukan arah pembangunan serta distribusi manfaat yang diterima masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara PT. Semen Tonasa dan Pemerintah Desa Biringere dalam memengaruhi tata kelola pemerintahan desa, distribusi pembangunan, dan proses pengambilan keputusan. Fokus penelitian diarahkan pada bentuk hubungan yang terbangun serta ketergantungan struktural yang muncul di antara kedua aktor tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi politik lokal serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pembangunan desa yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

2. Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, baik lisan maupun tertulis, yang diperoleh dari informan serta perilaku yang dapat diamati, sehingga memungkinkan pemahaman yang holistik terhadap fenomena sosial yang diteliti (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 1996). Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara mendalam relasi antara PT. Semen Tonasa sebagai industri ekstraktif dan Pemerintah Desa Biringere dalam konteks tata kelola pemerintahan desa.

Penelitian dilaksanakan di Desa Biringere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, selama periode Januari–Maret 2026. Lokasi ini dipilih karena merupakan wilayah yang berinteraksi langsung dengan aktivitas industri PT. Semen Tonasa,

sehingga relevan untuk menganalisis dinamika hubungan antara perusahaan dan pemerintah desa dalam proses pembangunan dan tata kelola lokal.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan interaksi langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen CSR/TJSL perusahaan, dokumen perencanaan pembangunan desa, peraturan desa, arsip administrasi, media massa, serta literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi (Sugiyono, 2011).

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kebutuhan penelitian (Bungin, 2011). Informan meliputi Kepala Desa dan Forum Desa Biringere, Manajer CSR/TJSL PT. Semen Tonasa, masyarakat penerima bantuan, serta guru PAUD yang terlibat atau terdampak langsung oleh program perusahaan.

Analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan informasi dari berbagai informan serta hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi guna memastikan konsistensi dan validitas temuan penelitian.

.

3. Result and Discussion

Bentuk relasi PT. Semen Tonasa dan Pemerintah Desa Biringere terhadap tata kelola Pemerintahan Desa dan distribusi Pembangunan

Relasi antara PT. Semen Tonasa dan Pemerintah Desa Biringere menunjukkan adanya hubungan yang erat antara korporasi dan pemerintahan desa dalam proses pembangunan lokal. Keberadaan perusahaan tidak hanya berpengaruh pada aspek ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi tata kelola pemerintahan desa, distribusi pembangunan, dan hubungan kekuasaan di tingkat lokal. Kondisi ini terlihat dari keterkaitan wilayah administrasi desa dengan kawasan operasional perusahaan. Kepala Desa Biringere menjelaskan bahwa:

“Desa Biringere itu luas wilayahnya kurang lebih 70% wilayah administrasinya masuk HGB PT. Semen Tonasa. Jadi pabrik dan tambang itu berada di wilayah administrasi Desa Biringere.”
(Wawancara, 21 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ruang administrasi desa dan ruang produksi perusahaan saling bersinggungan sehingga hubungan keduanya bersifat struktural. Dalam perspektif ekonomi politik industri ekstraktif, kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya menjadi aktor ekonomi, tetapi juga aktor yang memiliki pengaruh terhadap tata kelola lokal melalui penguasaan sumber daya, ruang produksi, dan akses ekonomi masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nurlinah dkk. (2018) yang menjelaskan bahwa tata kelola desa sering dipengaruhi oleh relasi kekuasaan antara pemerintah desa dan aktor yang memiliki sumber daya dominan. Dalam kerangka Village Governance Regimes (VGR), kondisi tersebut menunjukkan adanya pengaruh aktor eksternal yang kuat terhadap proses pemerintahan desa sehingga mendekati karakteristik captured regime sebagaimana dijelaskan oleh Aspinall dkk. (2025). Dalam bidang pembangunan, Pemerintah Desa Biringere mengakui bahwa perusahaan menjadi sumber dukungan penting bagi program-program yang tidak dapat dibiayai melalui APBDes. Kepala Desa Biringere menyatakan:

“Program apa yang tidak dianggarkan melalui APBDes, nah di situ CSR masuk support. Jadi CSR ini melengkapi program yang sudah kita canangkan, yang jadi prioritas tetapi tidak tercover oleh anggaran.” (Wawancara, 21 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berfungsi sebagai pelengkap fiskal bagi pembangunan desa. Dalam perspektif ekonomi politik, bantuan perusahaan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas sosial, tetapi juga sebagai bentuk relasi kekuasaan yang memperkuat posisi perusahaan dalam distribusi sumber daya pembangunan. Temuan ini sejalan dengan Pane dkk. (2021) yang menjelaskan bahwa program TJSL sering menjadi instrumen kesejahteraan sekaligus sarana membangun legitimasi korporasi di masyarakat. Hubungan tersebut juga terlihat dalam proses musyawarah pembangunan desa. Pemerintah desa tetap melaksanakan mekanisme partisipatif dengan melibatkan perusahaan, tokoh masyarakat, perangkat desa, dan unsur lainnya. Kepala Desa Biringere menjelaskan:

“Tonasa mengeluarkan rekomendasi untuk forum melakukan musyawarah dengan kita pemerintah desa. Jadi kami undang pihak perusahaan, tokoh masyarakat, perangkat desa, kepala dusun dan lainnya.” (Wawancara, 21 Februari 2026).

Meskipun partisipasi masyarakat tetap berlangsung, realisasi program pembangunan sangat dipengaruhi oleh dukungan perusahaan. Kondisi ini relevan dengan penelitian Haryanto dkk. (2025) tentang Participation without Accountability, yang menunjukkan bahwa partisipasi desa sering berjalan secara prosedural, tetapi keputusan substantif masih dipengaruhi oleh aktor yang memiliki sumber daya lebih besar. Kontribusi perusahaan terhadap pembangunan desa

juga terlihat dari alokasi dana TJSL yang mencapai Rp183.563.000 untuk program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pengelolaan lingkungan. Sekretaris Forum TJSL Desa menjelaskan: *“Kalau untuk dana, yang diberikan itu 180 juta lebih untuk TJSL di masing-masing 12 lingkaran desa.” (Wawancara, 21 Februari 2026).*

Program tersebut diarahkan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pembentukan kelompok usaha bengkel bagi pemuda desa. Salah seorang penerima manfaat menyatakan: *“Anak-anak muda di sini kodong banyak yang tidak kerja, jadi dibikinkan bengkel mereka yang kelola.” (Wawancara, 26 Februari 2026).*

Dalam perspektif Karl Polanyi, aktivitas ekonomi selalu melekat pada hubungan sosial. Oleh karena itu, program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan perusahaan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun hubungan sosial-ekonomi yang semakin memperkuat posisi perusahaan dalam kehidupan masyarakat desa. Meskipun demikian, distribusi bantuan belum sepenuhnya dianggap merata oleh masyarakat. Salah satu warga menyampaikan harapannya:

“Mudah-mudahan lebih ditingkatkan, lebih merata lagi supaya semua masyarakat dapat, tidak ada yang cemburu.” (Wawancara, 26 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya tuntutan masyarakat terhadap keadilan distribusi pembangunan. Dalam perspektif VGR, kondisi ini mencerminkan aspek demand, yaitu kemampuan masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan dan mengawasi kualitas tata kelola pembangunan desa.

Ketergantungan struktural dalam relasi PT. Semen Tonasa dan Pemerintah Desa Biringere memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat desa

Ketergantungan struktural antara PT. Semen Tonasa dan Pemerintah Desa Biringere terlihat dari besarnya peran perusahaan dalam mendukung pembangunan desa. Dalam perspektif ekonomi politik industri ekstraktif, penguasaan sumber daya ekonomi oleh perusahaan tidak hanya menghasilkan keuntungan ekonomi, tetapi juga membentuk relasi kekuasaan yang memengaruhi proses pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Bentuk ketergantungan tersebut terlihat ketika hasil perencanaan pembangunan desa harus diajukan kepada perusahaan untuk dievaluasi sebelum direalisasikan. Kepala Desa Biringere menjelaskan:

“Hasil RENJA itu kita ajukan ke Tonasa. Setelah itu Tonasa panggil kita rapat evaluasi. Kalau dipertimbangkan layak, yaah.. langsung diterima.” (Wawancara, 21 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keputusan pembangunan desa tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah desa, melainkan juga dipengaruhi oleh persetujuan perusahaan sebagai penyedia sumber daya pembangunan. Kondisi ini memperlihatkan adanya dualisme pengambilan keputusan, yaitu keputusan formal berada pada pemerintah desa, sedangkan realisasi program bergantung pada perusahaan. Selain itu, perusahaan memiliki prioritas program tertentu dalam penyaluran bantuan TJSL. Manajer TJSL PT. Semen Tonasa menjelaskan: *“Prioritasnya program itu harus terkait pendidikan, lingkungan, atau pemberdayaan ekonomi. Selain itu kita tidak bisa akomodir.” (Wawancara, 09 Maret 2026).*

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat harus disesuaikan dengan kerangka kebijakan perusahaan agar dapat memperoleh dukungan. Temuan ini sejalan dengan Talitha dkk. (2025) yang menjelaskan bahwa pembangunan lokal sering mengalami penyesuaian terhadap prioritas lembaga penyedia sumber daya. Ketergantungan tersebut juga berimplikasi pada dinamika politik lokal. Manajer TJSL PT. Semen Tonasa menyatakan:

“Menjelang waktu pemilihan sangat berpengaruh... karena kepala desa pasti akan mengutamakan orang-orang terdekat atau pendukungnya, itu sering terjadi.” (Wawancara, 09 Maret 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa bantuan pembangunan berpotensi menjadi modal politik yang memperkuat legitimasi kepala desa atau kelompok tertentu. Temuan ini sejalan dengan Nurlinah dan Haryanto (2020) serta Syamsu A. Kamaruddin (2024) yang menjelaskan bahwa sumber daya pembangunan dapat menjadi instrumen konsolidasi kekuasaan elite lokal. Ketergantungan terhadap perusahaan juga dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Salah seorang warga menyatakan:

“Iya bergantung, kita butuh, dibagi-bagi tiap tahun ada PAUD, bengkel, sama sampah.” (Wawancara, 26 Februari 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan telah dipandang sebagai salah satu sumber kesejahteraan masyarakat di luar pemerintah desa. Dalam perspektif economic dependency, ketergantungan ekonomi yang tinggi dapat mengurangi daya tawar masyarakat dalam melakukan kritik maupun pengawasan terhadap perusahaan dan pemerintah desa. Walaupun demikian, pemerintah desa masih memiliki ruang negosiasi dalam hubungan tersebut. Kepala Desa Biringere menegaskan:

“Kalau menurut kita tidak cocok, yaah... kita yang menentukan programnya.” (Wawancara, 21 Februari 2026).

Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak sepenuhnya mendominasi proses pembangunan desa. Pemerintah desa tetap memiliki legitimasi formal dan kewenangan untuk menentukan arah pembangunan. Temuan ini sejalan dengan Asrawijaya dan Hidayana (2021) yang menjelaskan bahwa aktor lokal tetap memiliki ruang negosiasi meskipun berada dalam struktur kekuasaan yang tidak seimbang.

Secara keseluruhan, hubungan antara PT. Semen Tonasa dan Pemerintah Desa Biringere menunjukkan adanya relasi yang saling membutuhkan tetapi tidak sepenuhnya setara. Perusahaan berperan sebagai penyedia sumber daya pembangunan yang penting bagi desa, sementara pemerintah desa tetap memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan. Namun, ketergantungan terhadap sumber daya perusahaan menyebabkan sebagian proses pembangunan dan tata kelola desa harus menyesuaikan diri dengan kebijakan serta prioritas perusahaan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembangunan desa berlangsung dalam relasi ekonomi-politik yang dinamis antara pemerintah desa, korporasi, dan masyarakat lokal, sebagaimana dijelaskan oleh Bogdan dan Taylor dalam Moleong (1996) bahwa analisis kualitatif bertujuan memahami fenomena sosial secara mendalam melalui hubungan antaraktor yang membentuk realitas sosial.

4. Conclusion

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Relasi antara PT. Semen Tonasa dan Pemerintah Desa Biringere menunjukkan adanya hubungan yang erat dan saling berkaitan dalam tata kelola pemerintahan desa serta distribusi pembangunan. Kehadiran perusahaan tidak hanya berperan melalui program TJSL/CSR, tetapi juga melalui dukungan pembiayaan pembangunan, keterlibatan dalam musyawarah desa, serta bantuan sosial dan ekonomi kepada masyarakat. Kondisi ini menjadikan pembangunan desa tidak hanya bergantung pada APBDes, tetapi juga pada kontribusi perusahaan sebagai sumber pendukung pembangunan. Dalam praktiknya, pemerintah desa tetap menjalankan kewenangan formalnya, namun arah dan efektivitas pembangunan turut dipengaruhi oleh kapasitas ekonomi perusahaan. Relasi tersebut menghasilkan pola kemitraan yang bersifat asimetris, di mana perusahaan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap distribusi pembangunan. Meskipun

berbagai program perusahaan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, seperti penguatan UMKM, pendidikan, dan lingkungan hidup, distribusi bantuan yang belum merata masih berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat masyarakat.

2. Ketergantungan struktural antara PT. Semen Tonasa dan Pemerintah Desa Biringere memengaruhi proses pengambilan keputusan serta arah kebijakan pembangunan desa. Walaupun pemerintah desa memiliki otoritas formal dalam menetapkan program dan kebijakan, implementasi sebagian pembangunan tetap bergantung pada dukungan sumber daya dan persetujuan perusahaan. Situasi ini mendorong pemerintah desa untuk menyesuaikan usulan pembangunan dengan prioritas program TJSL perusahaan agar memperoleh dukungan pendanaan. Ketergantungan tersebut tidak hanya memengaruhi orientasi kebijakan desa, tetapi juga berdampak pada partisipasi masyarakat dan dinamika politik lokal. Masyarakat yang memperoleh manfaat ekonomi dari perusahaan cenderung memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi sehingga dapat memengaruhi daya kritis terhadap kebijakan perusahaan maupun pemerintah desa. Meskipun demikian, pemerintah desa masih memiliki ruang negosiasi dalam menentukan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, relasi yang terbentuk dapat dipahami sebagai bentuk *negotiated governance*, yaitu hubungan kerja sama yang didasarkan pada saling membutuhkan, namun tetap menunjukkan ketimpangan kekuasaan karena dominasi sumber daya berada pada pihak perusahaan.

References

- Mulyana, A., & Wijaya, H. (2018). Perancangan E-Payment System pada E-Wallet Menggunakan Kode QR Berbasis Android. *Komputika: Jurnal Sistem Komputer*, 7(2), 63-69. <https://doi.org/10.34010/komputika.v7i2.1511>.
- Aspinall, E., Berenschot, W., Ruhyanto, A., & Savirani, A. (2025). Comparing village politics across time and space. *South East Asia Research*, 33(1), 1–11. <https://doi.org/10.1080/0967828x.2025.2483163>
- Aspinall, E., Berenschot, W., Savirani, A., & Ruhyanto, A. (2025). Analysing and explaining variation in village governance regimes across Indonesia. *South East Asia Research*, 33(1), 12–31. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483168>
- Addison, T., & Roe, A. (2024). Industri ekstraktif: enklave atau sarana transformasi ekonomi? *Makalah Kerja WIDER*. <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2024/486-1>
- Asrawijaya, E., & Hudayana, B. (2021). The power of a leader in the Samin people's opposition movement to the development of a cement factory in the north Kendeng Mountains. *Humaniora*, 33(1), 26-38.
- Brasilya, W., Surya, B., & Saleh, H. (2022). Dampak Pembangunan Industri Semen Terhadap Dinamika Sosial Ekonomi Masyarakat. *Urban and Regional Studies Journal*, 5(1), 23–27. <https://doi.org/10.35965/ursj.v5i1.1963>
- Hasyim, M. (2020). The Factory Industry and Local Community around a PT. Semen Tonasa Factory: A Case study of Two Communities in the Pangkep Regency. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*. www.ijicc.net, 13(7).
- Harifuddin, H., Haris, S., Anriani, HB, Azuz, F., & Apriningsih, A. (2024). Konversi Lahan untuk Pabrik Semen dan Pertambangan: Dampak Perubahan Lingkungan terhadap Bencana dan Penghidupan Petani. *Jurnal Pengelolaan Lahan Terdegradasi dan Pertambangan*, 11 (2), 5485–5494. <https://doi.org/10.15243/jdmlm.2024.112.5485>.